

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK
PADA PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN
(Studi Perjanjian Maklon antara PT. SY Dan CH Kosmetik)

INTISARI

Oleh:

Aisha Welliana Surya¹, Ari Hernawan.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi asas itikad baik dalam perjanjian maklon antara PT. SY dengan CH Kosmetik yang merupakan perjanjian di bawah tangan. Tujuan selanjutnya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dalam hal perjanjian di bawah tangan antara PT. SY dan CH Kosmetik tidak mengimplementasikan asas itikad.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris dan bersifat deskriptif. Penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder atas berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan alat berupa studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara kepada narasumber dan responden dengan mempergunakan alat berupa pedoman wawancara. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama, asas itikad baik pada Perjanjian Maklon antara PT. SY dan CH Kosmetik belum sepenuhnya implementatif. Pada tahap pra kontraktual dan tahap kontraktual asas itikad baik telah terpenuhi, namun pada tahap pasca kontraktual terdapat itikad tidak baik. Kedua, akibat dari perjanjian maklon di bawah tangan yang tidak memenuhi asas itikad baik sendiri yaitu CH Kosmetik dapat menggugat PT. SY atau menyelesaikan permasalahan melalui jalur non-litigasi, serta dapat menyangkal perjanjian di bawah tangan. PT. SY juga dapat menyangkal adanya perjanjian lisan yang berkaitan dengan waktu pemenuhan prestasi. Perjanjian tersebut tidak sepenuhnya melindungi serta belum dapat mengakomodir kebutuhan para pihak, akan lebih baik jika perjanjian dilegalisasikan atau bisa dibuat di hadapan Notaris sehingga lebih melindungi para pihak.

Kata kunci: Perjanjian di bawah tangan, Perjanjian Maklon, Asas Itikad Baik, Akibat Hukum.

¹ Mendolo, RT/RW: 03/01, Bumireso, Wonosobo, aisha.welliana.surya@mail.ugm.ac.id.

² Guru Besar pada Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

*JURIDIC REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE
GOOD FAITH PRINCIPLE ON THE PRIVATE DEED
(Study of the Maklon Agreement between PT. SY and CH Cosmetics)*

ABSTRACT

By:

Aisha Welliana Surya¹, Ari Hernawan.²

This study aims to identify and analyze the implementation of the principle of good faith in the tolling agreement between PT. SY with CH Cosmetics which is a private agreement. The next objective is to find out and analyze the legal consequences in the case of an underhand agreement between PT. SY and CH Cosmetics do not implement the principle of faith.

This research is included in the type of empirical normative research and is descriptive. Normative research is carried out through library research to obtain secondary data on various primary, secondary, and tertiary legal materials by means of document studies. Empirical research was conducted to obtain primary data by interviewing sources and respondents using a tool in the form of interview guidelines. The research data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

Based on the results of the study, it can be concluded, first, the principle of good faith in the Maklon Agreement between PT. SY and CH Cosmetics are not yet fully implemented. At the pre-contractual stage and the contractual stage the principle of good faith has been fulfilled, but at the post-contractual stage there is bad faith. Second, as a result of an underhand toll agreement that does not fulfill the principle of good faith itself, namely CH Cosmetics, it can sue PT. SY or resolve the issue through non-litigation, and can deny the agreement under the hand. PT. SY can also deny the existence of a verbal agreement relating to the time of fulfillment of achievements. The agreement does not fully protect and has not been able to accommodate the needs of the parties, it would be better if the agreement was made in the presence of an authorized official or legalized so as to better protect the parties.

Keyword: *Private deed, Maklon Agreement, Good Faith Principle, Legal Consequences.*

¹ Mendolo, RT/RW: 03/01, Bumireso, Wonosobo, aisha.welliana.surya@mail.ugm.ac.id.

² Professor at the Faculty of Law, Gadjah Mada University.